

**ANALISIS PENGARUH PENDATAN ASLI DAERAH, BELANJA MODAL,
ANGKATAN KERJA DAN JUMLAH PENDUDUK TERHADAP PRODUK
DOMESTIK REGIONAL BRUTO (PDRB) DI PROVINSI SUMATERA BARAT
TAHUN 2019-2023**

SKRIPSI



Oleh :

Ramatul Iqbal

NPM : 1810011111026

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi
Jurusan Ekonomi Pembangunan*

PROGRAM STUDI EKONOMI PEMBANGUNAN

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UNIVERSITAS BUNG HATTA

PADANG

2025

HALAMAN PENGESAHAN

ANALISIS PENDAPATAN ASLI DAERAH, BELANJA MODAL, ANGKATAN
KERJA DAN JUMLAH PENDUDUK TERHADAP PRODUK DOMESTIK
REGIONAL BRUTO DI PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2019-2023

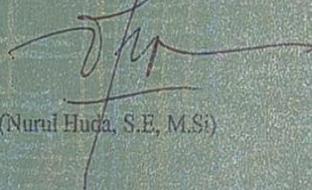
Oleh

Nama : RAMATUL IQBAL

Npm : 1810011111026

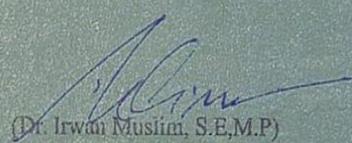
Tim Penguji

Ketua



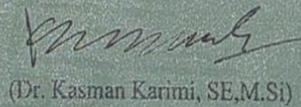
(Nurul Huda, S.E., M.Si)

Sekretaris



(Dr. Irwan Muslimi, S.E., M.P)

Anggota



(Dr. Kasman Karimi, SE, M.Si)

Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Pada tanggal 19 Maret 2025

Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Universitas Bung Hatta



JUDUL SKRIPSI
**ANALISIS PENDAPATAN ASLI DAERAH, BELANJA MODAL,
ANGKATAN KERJA DAN JUMLAH PENDUDUK TERHADAP PRODUK
DOMESTIK REGIONAL BRUTO DI PROVINSI SUMATERA BARAT
TAHUN 2019-2023**

Oleh

Nama : RAMATUL IQBAL

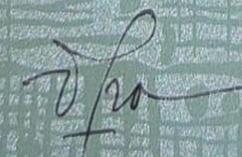
Npm : 1810011111026

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji

Pada tanggal 19 Maret 2025

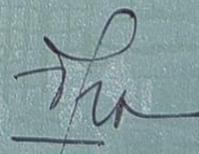
Menyetujui

Pembimbing



(Nurul Huda, S.E.,M.Si)

Ketua Program Studi



(Nurul Huda, S.E.,M.Si)

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Ramatul Iqbal

NPM :1810011111026

Program Studi : Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Judul Skripsi : Analisis Pendapatan Asli Daerah, Belanja Modal,
Angkatan Kerja dan Jumlah Penduduk terhadap Produk
Domestik Regional Bruto di Provinsi Sumatera Barat tahun
2019-2023

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar sarjana di suatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau terbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis diajukan dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Padang, 25 Maret 2025



Ramatul Iqbal
(1810011111026)

**ANALISIS PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH, BELANJA MODAL,
ANGKATAN KERJA DAN JUMLAH PENDUDUK TERHADAP PRODUK
REGIONAL DOMESTIK BRUTO DI PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN
2019-2023**

Ramatul Iqbal¹ Nurul Huda²

Prodi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Belanja Modal, Angkatan kerja dan Jumlah Penduduk terhadap Produk Domestik Regional Bruto di Provinsi Sumatera Barat tahun 2019-2023. Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yang dikumpulkan dari situs web Badan Pusat Statistik. Metode analisis yang digunakan adalah regresi data panel yakni gabungan antara data antar tempat (cross section) dengan data sebanyak 19 kabupaten /kota di Provinsi Sumatera Barat dan data antar waktu (time series) dengan data tahunan yaitu tahun 2019 – 2023. Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah, Belanja Modal, dan Jumlah Penduduk berpengaruh signifikan terhadap Produk Domestik Regional Bruto di Provinsi Sumatera Barat tahun 2019-2023. Sedangkan Angkatan Kerja tidak berpengaruh signifikan terhadap Produk Domestik Regional Bruto di Provinsi Sumatera Barat tahun 2019-2023.

Kata kunci : PDRB, PAD, Belanja Modal, Angkatan Kerja, Jumlah Penduduk.

DAFTAR ISI

BAB I	Error! Bookmark not defined.
PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	12
1.3 Tujuan Penelitian	12
1.4 Manfaat Penelitian	13
1.5 Ruang Lingkup Penelitian	13
BAB II	Error! Bookmark not defined.
TINJAUAN PUSTAKA	Error! Bookmark not defined.
2.1 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)..	Error! Bookmark not defined.
2.2 Pendapatan Asli Daerah (PAD).....	Error! Bookmark not defined.
2.3 Belanja Modal.....	Error! Bookmark not defined.
2.4 Angkatan Kerja.....	Error! Bookmark not defined.
2.5 Jumlah Penduduk.....	Error! Bookmark not defined.
2.6 Hubungan Antar Variabel.....	Error! Bookmark not defined.
2.7 Penelitian terdahulu	Error! Bookmark not defined.
2.8 Kerangka Konseptual.....	Error! Bookmark not defined.
2.9 Hipotesis	Error! Bookmark not defined.
BAB III	Error! Bookmark not defined.
METODE PENELITIAN	Error! Bookmark not defined.
3.1 Jenis Penelitian	Error! Bookmark not defined.
3.2 Operasional Variabel Penelitian	Error! Bookmark not defined.
3.3 Uji Asumsi Klasik.....	Error! Bookmark not defined.
3.4 Estimasi Model Data Panel.....	Error! Bookmark not defined.
3.5 Uji Untuk Menentukan Effect Regresi Panel	Error! Bookmark not defined.

3.6 Model Regresi Data Panel	Error! Bookmark not defined.
3.7 Uji Statistik	Error! Bookmark not defined.
BAB IV	Error! Bookmark not defined.
GAMBARAN UMUM VARIABEL	Error! Bookmark not defined.
4.1 Perkembangan Produk Domestik Bruto 19 Kabupaten Sumatera Barat	Error! Bookmark not defined.
4.2 Perkembangan Pendapatan Asli Daerah 19 Kabupaten Sumatera Barat	Error! Bookmark not defined.
4.3 Perkembangan Belanja Modal 19 Kabupaten Sumatera Barat	Error! Bookmark not defined.
4.4 Perkembangan Angkatan Kerja 19 Kabupaten Sumatera Barat	Error! Bookmark not defined.
4.5 Perkembangan Jumlah Penduduk 19 Kabupaten Sumatera Barat	Error! Bookmark not defined.
BAB V.....	63
HASIL DAN PEMBAHASAN.....	63
5.1 Uji Asumsi Klasik.....	Error! Bookmark not defined.
5.2 Uji Untuk Menentukan Effect Regresi Panel	Error! Bookmark not defined.
5.3 Model Regresi Data Panel	Error! Bookmark not defined.
5.4 Regresi Data Panel.....	Error! Bookmark not defined.
5.5 Uji Hipotesis	Error! Bookmark not defined.
5.6 Pembahasan	Error! Bookmark not defined.
BAB VI	Error! Bookmark not defined.
KESIMPULAN DAN SARAN	Error! Bookmark not defined.
6.1 Kesimpulan.....	Error! Bookmark not defined.
6.2 Saran	Error! Bookmark not defined.
DAFTAR PUSTAKA	Error! Bookmark not defined.
DAFTAR LAMPIRAN.....	82

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1Produk Domestik Regional Bruto 19 Kabupaten kota Di Sumatera Barat Tahun 2019-2023 (Milyar)	4
Tabel 1. 2Pendapatan Asli Daerah 19 Kabupaten kota Di Sumatera Barat Tahun 2019-2023 (Milyar)	6
Tabel 1. 3Belanja Modal 19 Kabupaten kota Di Sumatera Barat Tahun 2019-2023 (Juta Rupiah)	9
Tabel 1. 4Angkatan Kerja 19 Kabupaten kota Di Sumatera Barat Tahun 2019-2023 (Persen)	10
Tabel 1. 5Jumlah Penduduk 19 Kabupaten kota Di Sumatera Barat Tahun 2019-2023 (Jiwa)	11
Tabel 3. 1Defenisi Operasional Variabel.....	Error! Bookmark not defined.
Tabel 4. 1Produk Domestik Regional Bruto 19 Kabupaten kota Di Sumatera Barat Tahun 2019-2023 (Milyar)	Error! Bookmark not defined.
Tabel 4. 2Pendapatan Asli Daerah 19 Kabupaten kota Di Sumatera Barat Tahun 2019-2023 (Milyar)	Error! Bookmark not defined.
Tabel 4. 3Belanja Modal 19 Kabupaten kota Di Sumatera Barat Tahun 2019-2023 (Juta Rupiah)	Error! Bookmark not defined.
Tabel 4. 4 Angkatan Kerja 19 Kabupaten kota Di Sumatera Barat Tahun 2019-2023 (Persen)	Error! Bookmark not defined.
Tabel 4. 5 Jumlah Penduduk 19 Kabupaten kota Di Sumatera Barat Tahun 2019-2023 (Jiwa)	Error! Bookmark not defined.
Tabel 5. 1 Hasil Uji Normalitas.....	Error! Bookmark not defined.
Tabel 5. 2Hasil Uji Multikolinearitas	Error! Bookmark not defined.
Tabel 5. 3Hasil Heteroskedasitas	Error! Bookmark not defined.
Tabel 5. 4 Uji Chow.....	Error! Bookmark not defined.
Tabel 5. 5Uji Hausman	Error! Bookmark not defined.
Tabel 5. 6Uji LM-Test	Error! Bookmark not defined.

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Menurut Arsyad (2010) pembangunan ekonomi daerah adalah suatu proses adanya kerjasama yang dilakukan antara pemerintah dengan masyarakat di daerah, adapun pembangunan tersebut bertujuan untuk mengelola sumber daya yang ada baik sumber daya manusia bahkan sumber daya alam dengan tujuan untuk membentuk suatu kerjasama antara pemerintah daerah dengan sektor swasta guna terciptanya lapangan kerja baru dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah. Hingga saat ini pertumbuhan ekonomi digunakan sebagai indikator kemajuan perekonomian, dengan begitu pertumbuhan ekonomi penting di dalam melakukan analisis pembangunan ekonomi (Nuraini, 2017). Pengukuran tingkat keberhasilan suatu pembangunan yang dilaksanakan di suatu negara ataupun daerah dapat dilihat dari tingkat pertumbuhan ekonomi yang dicapai.

Pembangunan pada dasarnya merupakan proses multidimensial yang meliputi perubahan struktur sosial, perubahan dalam sikap hidup masyarakat dan perubahan dalam kelembagaan (institusi) nasional. Pembangunan juga meliputi perubahan dalam tingkat pertumbuhan ekonomi, pengurangan ketimpangan pendapatan dan pemberantasan kemiskinan. Untuk mencapai sasaran yang diinginkan, maka pembangunan suatu negara dapat diarahkan pada tiga hal pokok yaitu, meningkatkan ketersediaan dan distribusi kebutuhan pokok bagi masyarakat, meningkatkan standar hidup masyarakat dan meningkatkan kemampuan masyarakat dalam mengakses baik kegiatan ekonomi maupun kegiatan sosial dalam kehidupannya (Todaro, 2004).

Pertumbuhan ekonomi daerah diiringi dengan adanya pendapatan per kapita naik yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan jalan pembangunan ekonomi di setiap daerah, dengan adanya hal tersebut maka harus ada perubahan struktur ekonomi yang masih berkembang melambat atau bahkan belum berkembang dengan cara adanya human investment dan capital investment. Selain itu, tujuan dari pembangunan ekonomi daerah merupakan usaha yang dilakukan pemerintah guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan taraf hidup bangsa, yang diukur dengan tinggi rendahnya pendapatan per kapita tersebut. Dan yang paling penting bahwa pembangunan ekonomi adalah untuk meningkatkan produktifitas suatu daerah (Suparmoko, 2002).

Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan proses berkelanjutan merupakan kondisi utama bagi kelangsungan pembangunan ekonomi. Karena penduduk bertambah terus menerus dan berarti kebutuhan ekonomi juga terus bertambah, maka dibutuhkan penambahan pendapatan setiap tahunnya. Pembangunan mencakup pendidikan dan kesempatan kerja yang lebih setara, kesetaraan gender yang lebih besar, kesehatan dan nutrisi yang lebih baik, serta kehidupan masyarakat yang lebih sejahtera. Dengan meningkatnya pendapatan per kapita, sebagai aspek tersebut akan membaik pada tingkatan yang beragam (Thomas et al, 2000).

Salah satu indikator keberhasilan pelaksanaan pembangunan yang dapat dijadikan tolak ukur secara makro adalah pertumbuhan ekonomi. Akan tetapi meskipun telah digunakan sebagai indikator pembangunan, pertumbuhan ekonomi

masih bersifat umum dan belum mencerminkan kemampuan masyarakat secara individual. Pembangunan daerah diharapkan akan membawa dampak positif pula terhadap pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi daerah dapat dicerminkan dari perubahan PDRB dalam suatu wilayah (Suryono,2010).

Pertumbuhan ekonomi negara didukung oleh pertumbuhan ekonomi yang dihasilkan oleh tiap - tiap wilayah. Pertumbuhan ekonomi daerah dapat dilihat dari nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Sama halnya dengan PDB, yang menjadi tolak ukur nilai PDRB adalah nilai barang dan jasa yang dihasilkan dalam suatu daerah dalam suatu tahun tertentu dengan menggunakan faktor - faktor produksi yang dimiliki daerah tersebut. Nilai PDRB inilah yang akan menunjukkan tingkat kemajuan pembangunan daerah tersebut (Untari, 2017).

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2018, pertumbuhan ekonomi Indonesia dalam 2 tahun terakhir mengalami peningkatan meskipun tipis. Pertumbuhan ekonomi Indonesia cenderung stabil kisaran angka 5 persen. Namun jika dilihat lebih mendalam, struktur pertumbuhan ekonomi Indonesia justru mengalami perbaikan dalam beberapa waktu belakangan. Sama halnya dengan Indonesia, Provinsi Sumatera Barat juga mengalami kenaikan dalam aspek pertumbuhan ekonominya. Dapat dilihat besarnya PDRB berdasarkan harga konstan yang ada di kabupaten / kota di Provinsi Sumatera Barat mengalami ketidakstabilan pada beberapa tahun kebelakang dibawah ini :

Tabel 1. 1 Produk Domestik Regional Bruto 19 Perkabupaten kota Di Sumatera Barat Tahun 2019-2023 (Milyar)

Wilayah Untuk APBN	2019	2020	2021	2022	2023
Kab. Kepulauan Mentawai	3,011,724.00	2,956,007.00	3,040,969.00	3,191,296.00	3,320,146.00
Kab. Pesisir Selatan	9,576,664.00	9,470,783.00	9,788,460.00	10,181,466.00	10,608,286.00
Kab. Solok	9,905,603.00	9,792,918.00	10,114,579.00	10,547,974.00	11,008,007.00
Kab. Sijunjung	6,757,041.00	6,683,021.00	6,892,613.00	7,163,428.00	7,468,597.00
Kab. Tanah Datar	9,684,473.00	9,575,900.00	9,889,459.00	10,300,925.00	10,757,913.00
Kab. Padang Pariaman	13,334,925.00	11,939,479.00	12,195,748.00	13,029,174.00	13,740,823.00
Kab. Agam	14,608,894.00	14,409,166.00	14,942,561.00	15,572,207.00	16,275,985.00
Kab. Lima Puluh Kota	11,192,423.00	11,062,317.00	11,430,808.00	11,890,132.00	12,430,828.00
Kab. Pasaman	6,176,326.00	6,122,756.00	6,327,967.00	6,586,255.00	6,876,872.00
Kab. Solok Selatan	3,977,409.00	3,928,032.00	4,058,515.00	4,221,147.00	4,414,119.00
Kab. Dharmasraya	7,560,323.00	7,454,968.00	7,708,751.00	8,037,790.00	8,387,147.00
Kab. Pasaman Barat	11,411,831.00	11,258,351.00	11,675,977.00	12,158,617.00	12,684,894.00
Kota Padang	44,456,786.00	43,631,943.00	45,226,642.00	47,175,948.00	49,316,187.00
Kota Solok	2,876,461.00	2,835,750.00	2,936,548.00	3,071,575.00	3,219,310.00
Kota Sawahlunto	2,796,536.00	2,760,924.00	2,829,350.00	2,941,269.00	3,072,346.00
Kota Padang Panjang	2,580,604.00	2,543,404.00	2,631,378.00	2,746,835.00	2,879,854.00
Kota Bukittinggi	6,152,077.00	6,045,085.00	6,263,040.00	6,555,328.00	6,869,402.00
Kota Payakumbuh	4,488,211.00	4,414,294.00	4,572,192.00	4,778,349.00	5,002,696.00
Kota Pariaman	3,592,022.00	3,544,660.00	3,668,979.00	3,835,250.00	4,018,868.00

Sumber : BPS Sumbar

Dilihat dari tabel 1.1 diatas menunjukkan PDRB 19 Kabupaten Kota Di Sumatera Barat dari tahun 2019-2023. Pada tahun 2023 kabupaten kota dengan PDRB paling tinggi adalah kota padang yaitu sebesar Rp49.316.187 milyar dan yang terendah adalah kota Padang Panjang yaitu sebesar Rp2,543,404.000 milyar.

Dengan melihat kondisi pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat yang mengalami ketidakstabilan tersebut maka merupakan masalah yang menarik untuk dikaji mengingat sumber daya alam dan prasarana penunjang yang relatif sama dibanding provinsi lain, bahkan letak Sumatera Barat berada ditengah Pulau Sumatera, dinilai memiliki arti strategis tersendiri.

Dalam hal untuk meningkatkan PDRB di daerah Provinsi Sumatera Barat dibutuhkan peran penting pemerintah dalam mengatur pendapatan asli daerah, belanja modal dan angkatan kerja sebagai modal untuk membangun daerah serta tercapainya pertumbuhan ekonomi yang diharapkan. Pemerintah daerah

diharapkan mampu menggali sumber - sumber keuangan lokal, khususnya melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD). PAD merupakan salah satu sumber penerimaan daerah, dimana menjadi salah satu faktor meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Tinggi rendahnya PAD merupakan cerminan adanya partisipasi masyarakat dan pemerintah untuk mengelola potensi suatu daerahnya (Saragih, 2003).

Menurut UU No. 33 Tahun 2004, PAD adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber - sumber di dalam daerahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku. Selain itu, PAD juga dapat diartikan sebagai pendapatan yang bersumber dari pungutan - pungutan yang dilakukan oleh pemerintah daerah berdasarkan peraturan - peraturan yang berlaku yang dapat dikenakan kepada setiap orang atau badan usaha, baik milik pemerintah atau swasta karena perolehan jasa yang diberikan pemerintah daerah tersebut, maka daerah dapat melaksanakan pungutan dalam bentuk penerimaan pajak, retribusi dan penerimaan lainnya yang sah diatur dalam undang - undang. Daerah yang pertumbuhan ekonominya positif mempunyai kemungkinan mendapatkan kenaikan PAD. Dapat dilihat besarnya PAD yang ada di kabupaten / kota di Provinsi Sumatera Barat mengalami ketidakstabilan pada beberapa tahun kebelakang dibawah ini :

Tabel 1. 2 Pendapatan Asli Daerah 19 Perkabupaten kota Di Sumatera Barat Tahun 2019-2023 (Milyar)

Wilayah Untuk APBN	2019	2020	2021	2022	2023
Kab. Kepulauan Mentawai	1.011.417.211,76	752,867,946.68	830,153,085.30	841,527,766.25	918,000,000,00
Kab. Pesisir Selatan	1.699.011.062,11	1,596,930,161.84	1,682,882,249.04	1,633,057,724.70	1,623,810,000,00
Kab. Solok	1.254.707.484,57	1,128,683,086.17	1,216,306,520.99	1,198,526,934.14	1,225,100,000,00
Kab. Sijunjung	997.601.916,70	924,636,222.82	970,506,206.64	950,197,594.86	971,870,000,00
Kab. Tanah Datar	1.339.707.228,55	1,184,165,496.05	1,251,060,500.70	1,173,573,895.01	1,240,720,000,00
Kab. Padang Pariaman	1.510.528.680,35	1,284,379,790.52	1,363,454,281.99	1,348,628,181.50	1,391,730,000,00
Kab. Agam	1.511.711.867,55	1,359,735,868.18	1,411,504,675.34	1,387,989,964.29	1,467,880,000,00
Kab. Lima Puluh Kota	1.336.485.510,30	1,171,959,633.16	1,260,792,546.31	1,225,539,476.82	1,250,300,000,00
Kab. Pasaman	1.036.257.946,85	925,794,882.68	1,020,241,378.59	1,023,824,389.48	1,065,650,000,00
Kab. Solok Selatan	913.258.324,43	785,252,826.71	866,235,598.99	884,655,899.04	824,720,000,00
Kab. Dharmasraya	1.019.358.071,25	958,520,918.20	978,920,717.10	911,076,883.28	916,850,000,00
Kab. Pasaman Barat	1.207.899.830,10	1,012,655,676.10	1,164,043,474.66	1,157,750,690.66	1,113,920,000,00
Kota Padang	2.350.116.615,61	2,167,553,674.66	2,222,266,851.38	2,249,627,970.20	2,569,850,000,00
Kota Solok	615.403.730,49	545,244,425.68	547,429,561.40	545,957,549.08	548,820,000,00
Kota Sawahlunto	638.026.463,49	559,804,511.07	598,040,864.19	620,647,226.21	606,400,000,00
Kota Padang Panjang	578.337.138,95	531,072,153.61	570,435,613.98	538,392,534.01	544,460,000,00
Kota Bukittinggi	734.106.696,90	689,356,591.51	688,635,054.45	698,402,386.32	751,260,000,00
Kota Payakumbuh	796.837.014,30	716,736,685.22	677,296,933.41	704,772,804.63	714,070,000,00
Kota Pariaman	673.533.272,85	627,334,838.61	613,252,687.86	606,838,687.95	645,910,000,00

Sumber : BPS Sumbar

Dilihat dari tabel 1.2 diatas menunjukkan pendapatan asli daerah 19 Kabupaten Kota Di Sumatera Barat dari tahun 2019-2023. Pada kabupaten kota dengan pendapatan asli daerah paling tinggi adalah kota padang yaitu tahun 2022 sebesar Rp2.249.627.970,20 milyar dan yang terendah adalah tahun 2020 Kota Padang Panjang yaitu sebesar Rp531,072,153.61.

Selain itu salah faktor yang diduga memengaruhi PDRB adalah belanja modal. Belanja modal merupakan belanja yang dipergunakan untuk jangka waktu lebih dari satu tahun atau disebut jangka panjang untuk mendapatkan aset tetap

pemerintah daerah, yaitu peralatan, bangunan, infrastruktur dan harta tetap lainnya dengan cara membeli yang umumnya dilakukan dengan proses lelang atau tender yang cukup rumit (Abdullah dan Halim, 2006).

Belanja modal yang dilakukan oleh pemerintah daerah juga digunakan diantaranya untuk pembangunan dan perbaikan infrastruktur di dalam sektor pendidikan, kesehatan dan transportasi sehingga masyarakat turut menikmati manfaat dari pembangunan daerah. Tersedianya infrastruktur yang baik diharapkan dapat menciptakan efisiensi dan efektifitas di berbagai sektor tersebut, produktivitas masyarakat pun menjadi semakin tinggi dan pada akhirnya terjadi peningkatan pertumbuhan ekonomi (Aula, 2013). Saragih (2003) menyatakan bahwa pemanfaatan belanja hendaknya dialokasikan untuk hal - hal produktif, misalnya untuk melakukan aktivitas pembangunan. Oleh karena itu pengaruh PAD dan belanja modal terhadap pertumbuhan ekonomi, semakin tinggi PAD dan belanja modal maka tingkat pertumbuhan ekonomi di suatu daerah akan semakin tinggi.

Hal ini disebabkan karena dengan adanya peningkatan PAD, maka dana yang dimiliki oleh pemerintah daerah tersebut akan lebih tinggi, sehingga pemerintah daerah akan berinisiatif untuk lebih menggali potensi - potensi daerah dan akhirnya akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi (Harianto dan Adi, 2007). Dapat dilihat besarnya Belanja modal yang ada di kabupaten / kota di Provinsi Sumatera Barat mengalami ketidakstabilan pada beberapa tahun kebelakang dibawah ini :

**Tabel 1. 3 Belanja Modal 19 Perkabupaten kota Di Sumatera Barat Tahun 2019-2023
(Juta Rupiah)**

Wilayah Untuk APBN	2019	2020	2021	2022	2023
Kab. Kepulauan Mentawai	11,878.15	2,135.28	10,657.95	3,962.71	2,966.76
Kab. Pesisir Selatan	3,983.98	10,892.33	8,818.07	9,001.84	4,617.15
Kab. Solok	7,749.40	5,815.24	18,313.38	3,077.61	3,984.38
Kab. Sijunjung	664.09	4,575.03	2,101.29	1,699.52	2,989.74
Kab. Tanah Datar	45,895.00	14,438.95	7,944.15	10,769.08	12,222.61
Kab. Padang Pariaman	27,897.90	27,545.81	15,035.14	12,155.62	41,790.12
Kab. Agam	6,647.28	11,061.45	2,968.57	6,500.84	10,934.23
Kab. Lima Puluh Kota	11,156.10	6,994.93	10,218.75	5,744.30	10,281.63
Kab. Pasaman	9,878.42	4,463.08	3,276.91	1,500.40	7,745.14
Kab. Solok Selatan	1,529.50	1,663.87	2,697.33	1,684.39	1,948.29
Kab. Dharmasraya	41,414.52	56,576.70	100,922.64	91,480.46	100,548.64
Kab. Pasaman Barat	3,940.58	7,545.21	8,910.09	7,302.66	8,637.39
Kota Padang	2,387,770.19	1,502,475.50	1,391,908.61	1,284,170.93	871,937.73
Kota Solok	2,928.57	2,396.15	6,310.62	4,613.71	2,685.74
Kota Sawahlunto	1,243.90	6,848.40	4,251.55	1,210.24	4,752.97
Kota Padang Panjang	27,261.47	14,481.03	18,195.26	6,015.18	23,511.52
Kota Bukittinggi	111,295.38	38,465.34	50,340.20	68,376.58	109,518.51
Kota Payakumbuh	4,852.31	2,604.39	4,950.44	2,012.30	2,659.54
Kota Pariaman	11,156.50	7,266.36	1,304.58	1,540.62	1,445.01

Sumber : BPS Sumbar

Dilihat dari tabel 1.3 diatas menunjukkan belanja modal 19 Kabupaten Kota Di Sumatera Barat dari tahun 2019-2023. Belanja modal paling tinggi terjadi pada tahun 2019 pada kota Padang yaitu sebesar Rp2,387,770.19 juta dan yang terendah pada tahun 2019 adalah kabupaten Sijunjung yaitu sebesar Rp664.09 juta.

Selain PAD dan belanja modal, sumber daya manusia juga merupakan faktor yang diduga memengaruhi peningkatan pertumbuhan ekonomi. Sumber daya manusia yang dimaksud adalah angkatan kerja. Angkatan kerja adalah penduduk yang bekerja, belum bekerja dan sedang mencari pekerjaan yang dimana sedang dalam usia kerja. Angkatan kerja yang besar akan terbentuk dari jumlah penduduk yang besar, namun pertumbuhan penduduk dikhawatirkan akan menimbulkan efek yang buruk terhadap pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan penduduk yang cepat mendorong timbulnya masalah keterbelakangan dan membuat prospek pembangunan menjadi semakin jauh.

Selanjutnya dikatakan bahwa masalah kependudukan yang timbul bukan karena banyaknya jumlah anggota keluarga, melainkan karena mereka terkonsentrasi pada daerah perkotaan saja sebagai akibat dari cepatnya laju migrasi dari desa ke kota. Namun demikian jumlah penduduk yang cukup dengan tingkat pendidikan yang tinggi dan memiliki skill akan mampu mendorong laju pertumbuhan ekonomi.

Dari jumlah penduduk usia produktif yang besar maka akan mampu meningkatkan jumlah angkatan kerja yang tersedia dan pada akhirnya akan mampu meningkatkan produksi output di suatu daerah (Todaro, 2000). Dapat dilihat perkembangan tingkat angkatan kerja yang ada di kabupaten / kota di Provinsi Sumatera Barat mengalami ketidakstabilan pada beberapa tahun kebelakang dibawah ini :

Tabel 1. 4 Angkatan Kerja 19 Perkabupaten kota Di Sumatera Barat Tahun 2019-2023 (Persen)

Wilayah Untuk APBN	2019	2020	2021	2022	2023
Kab. Kepulauan Mentawai	83.1	81.65	82.57	78.25	80.07
Kab. Pesisir Selatan	68.82	65	66.59	66.95	65
Kab. Solok	70.83	74.64	71.21	74.44	76.74
Kab. Sijunjung	70.17	70.7	70.06	68.17	68.51
Kab. Tanah Datar	69.25	69.42	66.88	70.9	69.43
Kab. Padang Pariaman	63.23	67.18	64.64	70.44	65.18
Kab. Agam	69.59	70.29	66.49	73.05	69.16
Kab. Lima Puluh Kota	73.28	72.71	71.33	74.54	72.63
Kab. Pasaman	70.91	72.97	69.35	74.97	73.05
Kab. Solok Selatan	72.56	72.67	72.11	77.99	76.52
Kab. Dharmasraya	70.49	72.72	73.04	71.65	73.93
Kab. Pasaman Barat	65.76	67.47	66.93	63.88	66.42
Kota Padang	61.98	64.31	63.78	62.81	66.99
Kota Solok	62.51	66.77	66.51	69.46	70.12
Kota Sawahlunto	69.83	70.57	68.05	70.85	69.9
Kota Padang Panjang	69.05	69.81	65.94	64.02	66.05
Kota Bukittinggi	65.55	69.84	67.42	64.43	70.27
Kota Payakumbuh	68.76	68.68	71.73	70.06	71.86
Kota Pariaman	69.36	64.16	62.7	67.76	71.23

Sumber : BPS Sumbar

Dilihat dari tabel 1.4 diatas menunjukkan Angkatan Kerja 19 Kabupaten Kota Di Sumatera Barat dari tahun 2019-2023. Angkatan kerja paling tinggi terjadi pada tahun 2019 pada Kab. Kepulauan Mentawai yaitu sebesar 83,1% dan yang terendah pada tahun 2019 adalah Kota Padang yaitu sebesar 61,98%.

selanjutnya jumlah penduduk berdampak pada meningkatnya PDRB , jumlah penduduk dalam pembangunan ekonomi suatu daerah merupakan permasalahan mendasar. Karena pertumbuhan penduduk yang tidak terkendali dapat mengakibatkan tidak tercapainya tujuan pembangunan ekonomi yaitu kesejahteraan rakyat serta menekan angka kemiskinan.

Tabel 1. 5 Jumlah Penduduk 19 Perkabupaten kota Di Sumatera Barat Tahun 2019-2023 (Jiwa)

Wilayah Untuk APBN	2019	2020	2021	2022	2023
Kab. Kepulauan Mentawai	92021	87623	88389	89401	90406
Kab. Pesisir Selatan	463923	504418	509618	516518	523402
Kab. Solok	373414	391497	394237	397829	401371
Kab. Sijunjung	237376	235045	237313	240317	243308
Kab. Tanah Datar	348219	371704	373693	376276	378797
Kab. Padang Pariaman	415613	430626	433018	436129	439171
Kab. Agam	491282	529138	534202	540905	547578
Kab. Lima Puluh Kota	382817	383525	385634	388375	391054
Kab. Pasaman	281211	299851	303103	307425	311744
Kab. Solok Selatan	171075	182027	184854	188649	192481
Kab. Dharmasraya	247579	228591	231217	234713	238211
Kab. Pasaman Barat	443722	431672	436313	442479	448639
Kota Padang	950871	909040	913448	919145	924687
Kota Solok	71010	73438	74469	75850	77240
Kota Sawahlunto	62524	65138	65687	66413	67131
Kota Padang Panjang	53693	56311	56971	57850	58729
Kota Bukittinggi	130773	121028	121588	122311	123013
Kota Payakumbuh	135573	139576	141184	143325	145468
Kota Pariaman	88501	94224	95294	96719	98143

Sumber : BPS Sumbar

Dilihat dari tabel 1.5 diatas menunjukkan Jumlah Penduduk 19 Kabupaten Kota Di Sumatera Barat dari tahun 2019-2023. Jumlah Penduduk paling tinggi terjadi pada

tahun 2019 pada Kota Padang yaitu sebesar 950.871 jiwa dan yang terendah pada tahun 2019 adalah Kota Padang yaitu sebesar 53.693 jiwa.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk mengambil judul “**Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Belanja Modal, Angkatan Kerja dan Jumlah Penduduk Terhadap Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019-2023**”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka perumusan masalah pada penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap PDRB Kabupaten / Kota di Provinsi Sumatera Barat?
2. Bagaimana pengaruh Belanja Modal terhadap PDRB Kabupaten / Kota di Provinsi Sumatera Barat?
3. Bagaimana pengaruh Angkatan Kerja terhadap PDRB Kabupaten / Kota di Provinsi Sumatera Barat?
4. Bagaimana pengaruh Jumlah Penduduk terhadap PDRB Kabupaten / Kota di Provinsi Sumatera Barat?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap PDRB Kabupaten / Kota di Provinsi Sumatera Barat.
2. Untuk menganalisis pengaruh Belanja Modal terhadap PDRB Kabupaten

/ Kota di Provinsi Sumatera Barat.

3. Untuk menganalisis pengaruh Angkatan Kerja terhadap PDRB Kabupaten/ Kota di Provinsi Sumatera Barat.
4. Untuk menganalisis pengaruh jumlah penduduk terhadap PDRB Kabupaten/ Kota di Provinsi Sumatera Barat.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Bagi penulis yaitu meningkatkan pengetahuan, wawasan dan memberikan pemahaman yang semakin mendalam tentang konsep faktor-faktor yang mempengaruhi PDRB.
2. Bagi pembaca, diharapkan penelitian ini dapat menambah pengetahuan pembaca dan memberikan penjelasan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi PDRB Kabupaten / Kota di Provinsi Sumatera Barat.
3. Sebagai bahan referensi bagi peneliti lain yang berkeinginan untuk melakukan penelitian yang sejenis.
4. Menambah, melengkapi dan sebagai pembanding bagi hasil-hasil penelitian yang sudah ada menyangkut topik yang sama.

1.5 Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup dari penelitian ini adalah :

1. Variabel dependent yang diteliti adalah Produk Domestik Regional Bruto
2. Variabel independent yang diteliti adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD), Belanja Modal dan Angkatan Kerja.
3. Objek penelitian adalah seluruh kabupaten / kota di Provinsi Sumatera Barat.